Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PT. DELTA MITRA SEMESTA DI KOTA SURABAYA

Ryzam Muzambiq *, I Dewa Gede Putra Sedana [2], dan Ni Luh Putu Ening Permini [3]

[123] Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai

ARTICLE INFO

Article history:
Received September, 2025
Revised September, 2025
Accepted September, 2025
Available online September, 2025

muzaryzam@gmail.com,
dewaputrasedana17@gmail.com,
ening.permini@unr.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Delta Mitra Semesta di Kota Surabaya serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus; pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan penelusuran online dengan pemilihan informan secara purposive; analisis data bersifat induktif dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan—terlihat dari alokasi anggaran iuran, adanya tim administrasi khusus, serta koordinasi rutin dengan pihak BPJS—yang didukung oleh komitmen manajemen dan kompetensi staf HRD. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena beberapa hambatan utama: pemahaman detail kebijakan yang belum merata di kalangan manajemen dan pekerja, fluktuasi jumlah tenaga outsourcing yang menyulitkan administrasi, kurangnya sosialisasi internal kepada pekerja, tekanan biaya operasional, serta keterbatasan pengawasan pemerintah daerah. Kesimpulannya, implementasi berada pada tingkat pemenuhan normatif tetapi memerlukan peningkatan pada sosialisasi internal, pengelolaan data pekerja outsourcing, dan penguatan koordinasi dengan BPJS serta pemangku kepentingan terkait agar efektivitas kebijakan tercapai secara menyeluruh.

Kata Kunci*:* Implementasi Kebijakan; BPJS Ketenagakerjaan; PT Delta Mitra Semesta Surabaya.

A B S T R A C T

This study examines the implementation of the BPJS Ketenagakerjaan membership policy at PT Delta Mitra Semesta in Surabaya and identifies factors supporting and hindering its execution. The research employed a descriptive qualitative case study design; data were collected through observation, semi-structured interviews, documentation, and online searches with purposive sampling, and analyzed inductively and descriptively. Findings indicate that the company has taken concrete steps to enroll employees in BPJS Ketenagakerjaan—allocating budget for contributions, maintaining a dedicated administration team, and coordinating regularly with BPJS—backed by management commitment and HR competence. However, implementation is not yet fully effective due to key constraints: uneven understanding of technical policy details among management and workers, fluctuating numbers of outsourced staff complicating administration, insufficient internal dissemination of information, operational cost pressures, and limited governmental oversight. In conclusion, the company demonstrates normative compliance but needs to improve internal socialization, adaptive data management for outsourced workers, and strengthened coordination with BPJS and local authorities to achieve full policy effectiveness.

Keywords *: Policy Implementation*; BPJS Ketenagakerjaan; PT Delta Mitra Semesta Surabaya.

*Corresponding author
E-mail addresses: muzaryzam@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi. Untuk menjamin kesejahteraan pekerja, negara memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Hal ini semakin penting mengingat perkembangan pola kerja baru, seperti outsourcing dan kontrak jangka pendek, yang berpotensi menimbulkan kerentanan perlindungan tenaga kerja.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat perusahaan tidak selalu berjalan mulus. PT Delta Mitra Semesta sebagai perusahaan outsourcing di Kota Surabaya memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Namun, dinamika jumlah pekerja outsourcing, keterbatasan pemahaman teknis kebijakan, serta kurangnya sosialisasi internal menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana implementasi kebijakan ini dilaksanakan serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis dinamika pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana PT Delta Mitra Semesta memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS, serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian administrasi publik, sekaligus manfaat praktis bagi perusahaan, instansi pengawas ketenagakerjaan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan tenaga kerja yang lebih efektif

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi dalam kajian administrasi publik dipahami sebagai proses untuk menerjemahkan rumusan kebijakan menjadi tindakan nyata sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Proses ini bukan hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga melibatkan koordinasi antaraktor, penyesuaian dengan kondisi lapangan, serta kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis maupun non-teknis. Oleh karena itu, implementasi sering dipandang sebagai tahap krusial dalam siklus kebijakan.

Model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn menegaskan adanya enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-politik-ekonomi, serta disposisi pelaksana. Apabila variabel-variabel ini dapat berjalan seimbang, implementasi akan lebih efektif; sebaliknya, ketidaksesuaian antarvariabel dapat menimbulkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan persoalan publik. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak hanya berhenti pada perumusan, tetapi juga mencakup tahapan implementasi dan evaluasi yang menuntut keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik bersifat dinamis dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan yang ingin diselesaikan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Secara teoretis, kebijakan publik mengandung dua dimensi: dimensi normatif yang berkaitan dengan aturan dan peraturan hukum, serta dimensi operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Efektivitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan kedua dimensi ini, sehingga kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan program perlindungan bagi tenaga kerja melalui empat manfaat utama: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Program ini tidak hanya ditujukan bagi pekerja formal dengan status tetap, tetapi juga mencakup pekerja kontrak dan outsourcing, sehingga dapat meminimalisasi risiko sosial yang mungkin timbul akibat pola kerja fleksibel dan ketidakpastian hubungan kerja.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Tujuannya adalah memahami makna, fenomena, dan keunikan implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Delta Mitra Semesta melalui analisis induktif dan deskriptif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. Delta Mitra Semesta, berlokasi di Jl. Tanjung Sadari No. 15, Surabaya. Pelaksanaan penelitian direncanakan mulai 25 Juli 2025.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan meliputi data kualitatif (hasil observasi, wawancara, deskripsi fenomena) dan data kuantitatif (angka terkait jumlah pekerja dan kepesertaan). Sumber data terbagi menjadi primer (informasi langsung dari perusahaan dan pekerja) serta sekunder (literatur, artikel, jurnal, dan dokumen daring).

Instrumen Penelitian

Instrumen utama adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, yang menetapkan fokus, memilih informan, melakukan pengumpulan, menilai kualitas, serta menafsirkan data. Validitas instrumen ditentukan oleh kesiapan peneliti dalam melaksanakan seluruh tahapan penelitian.

Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengalaman, posisi, atau pengetahuan relevan terkait implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara semi-terstruktur dengan pihak perusahaan dan pekerja, dokumentasi (dokumen internal dan tertulis lainnya), serta penelusuran data daring yang mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, menekankan pada penafsiran data yang diperoleh dari lapangan. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Delta Mitra Semesta sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn

*Corresponding author
E-mail addresses: muzaryzam@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11 No 6, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Delta Mitra Semesta menunjukkan bahwa perusahaan memahami standar dan tujuan program sebagai kewajiban hukum untuk melindungi pekerja. Namun, pemahaman detail teknis kebijakan belum merata di kalangan manajemen dan pekerja. Dari sisi sumber daya, perusahaan telah mengalokasikan anggaran iuran dan memiliki tim administrasi khusus, tetapi fluktuasi jumlah pekerja outsourcing menimbulkan tantangan dalam pengelolaan data dan administrasi.

Karakteristik agen pelaksana, khususnya staf HRD, cukup kompeten dan telah mengikuti pelatihan dari BPJS, tetapi masih kurang dalam menyosialisasikan manfaat program kepada pekerja. Komunikasi perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan berjalan baik melalui koordinasi rutin, sementara komunikasi internal dengan pekerja belum optimal. Kondisi sosial dan ekonomi, seperti tekanan biaya operasional, serta keterbatasan pengawasan dari pemerintah daerah, turut memengaruhi implementasi. Meski demikian, disposisi pelaksana kebijakan di perusahaan relatif positif, ditunjukkan oleh komitmen manajemen untuk tetap mematuhi regulasi.

Secara keseluruhan, faktor pendukung utama implementasi adalah komitmen manajemen, ketersediaan anggaran, kompetensi staf HRD, dan koordinasi dengan pihak BPJS. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman teknis, dinamika jumlah pekerja outsourcing, kurangnya sosialisasi internal, beban biaya operasional, serta lemahnya pengawasan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah berada pada tingkat kepatuhan normatif, tetapi efektivitas implementasi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi, adaptasi manajemen SDM outsourcing, dan sinergi lebih erat dengan BPJS serta instansi pengawas.

PEMBAHASAN

Analisis implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Delta Mitra Semesta menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan dipahami sebagai kewajiban hukum untuk melindungi pekerja. Namun, pemahaman teknis detail oleh sebagian manajemen dan pekerja masih terbatas, sehingga dapat mengurangi optimalisasi manfaat program. Hal ini menegaskan pentingnya sosialisasi yang lebih intensif agar pekerja memahami hak dan kewajiban mereka secara menyeluruh.

Dari sisi sumber daya, perusahaan telah menunjukkan komitmen dengan menyediakan anggaran iuran dan membentuk tim HRD khusus. Namun, dinamika jumlah pekerja outsourcing menimbulkan kesulitan dalam administrasi dan pelaporan, menandakan perlunya strategi pengelolaan SDM yang lebih adaptif. Karakteristik agen pelaksana, khususnya staf HRD, dinilai kompeten secara teknis, tetapi masih kurang dalam mengomunikasikan manfaat program kepada pekerja, sehingga efektivitas implementasi belum sepenuhnya tercapai.

Komunikasi antar organisasi, khususnya antara perusahaan dan BPJS, berjalan baik melalui koordinasi rutin. Namun, komunikasi internal kepada pekerja masih lemah, terlihat dari minimnya informasi yang diterima karyawan tentang status kepesertaan maupun prosedur klaim. Faktor eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi dan pengawasan pemerintah juga berpengaruh; biaya operasional yang tinggi serta lemahnya pengawasan membuat perusahaan harus menyeimbangkan kepatuhan regulasi dengan keberlanjutan bisnis.

Pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat faktor pendukung seperti komitmen manajemen, kompetensi HRD, dan koordinasi dengan BPJS, hambatan berupa kurangnya pemahaman teknis, fluktuasi pekerja outsourcing, dan minimnya sosialisasi internal menjadi tantangan utama. Dengan demikian, implementasi kebijakan berada pada level kepatuhan



normatif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi, manajemen sumber daya, dan dukungan eksternal agar tujuan perlindungan pekerja dapat terealisasi optimal.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPJS Ketenagakerjaan di PT. Delta Mitra Semesta telah berjalan sesuai ketentuan dasar, ditandai dengan adanya komitmen manajemen, alokasi anggaran iuran, serta koordinasi dengan pihak BPJS. Namun, efektivitas implementasi belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat celah dalam pemahaman detail teknis kebijakan, terutama di kalangan manajemen dan pekerja. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen manajemen, ketersediaan sumber daya finansial, kompetensi staf HRD, dan komunikasi eksternal dengan BPJS. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup kurangnya sosialisasi internal, fluktuasi jumlah pekerja outsourcing, tekanan biaya operasional, serta lemahnya pengawasan pemerintah

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perusahaan perlu mengadakan sosialisasi rutin bagi seluruh pekerja agar pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS semakin merata. Selain itu, pengelolaan data kepesertaan perlu diperkuat melalui sistem informasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika pekerja outsourcing. Staf HRD sebaiknya diberikan pelatihan tambahan agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi program, sementara monitoring dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk mendeteksi kendala sejak dini. Terakhir, perusahaan disarankan menjalin kerjasama lebih erat dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi bersama sehingga keberlanjutan program dapat terjaga.

6. DAFTAR PUSTAKA

Al Asyari, S. V. U., & Budiarsih, B. (2022). Analisis kewajiban kepesertaan sistem bpjs kesehatan. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.144

Apriliani, A., & Bawamenewi, V. A. (2024). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Karimah Tauhid, 3(2), 1303-1314.

Fath-Hiah, W. N., & Nafi'ah, B. A. (2023). Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pedagang Sentra Wisata Kuliner (Swk) Siola Kota Surabaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM), 1(02), 202-208.

Fauzan, M., & Effendy, D. (2023, January 27). Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan BPJS oleh Perusahaan X di Kota Bandung Dihubungkan dengan UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bandung Conference Series: Law Studies. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4989

Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. Journal Publicuho, 4(2). https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573

*Corresponding author
E-mail addresses: muzaryzam@gmail.com



Hartati, S., Haryadi, T., Hartati, O., & Pratama, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Peserta Asuransi Sosial BPJS Kesehatan. Diktum. https://doi.org/10.24905/diktum.v9i1.96

Hoesin, S. H. (2023). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan terhadap Pemberian Surat Sanksi kepada Pekerja di PT X. Jurnal Syntax Admiration. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i3.564

Indrawati, I., & Simanjuntak, T. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. https://doi.org/10.26905/IDJCH.V10I1.3180

Iqbal, M., Fahmi, D., Nasution, D. R., & Dalimunthe, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Membangun Karakter di MAN 1 Deli Serdang. Journal on Education. https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1023

Laniari, M. (2015). Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) Dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun.

Mekarisce, A. A., Noerjoedianto, D., & Solida, A. (2022). Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS kesehatan KC Jambi. Riset Informasi Kesehatan. https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.548

Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. https://doi.org/10.21776/UB.JPAS.2020.005.01.7

Nismawati, I., Umaruzzaman, U., & Mahadewi, E. P. (2022). Implication of BPJS for Private Health Insurance Marketing and Business Competition in Indonesia. International Journal of Health and Pharmaceutical. https://doi.org/10.51601/ijhp.v2i3.96

Pristanti, S. N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2022). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pada Pekerja Informal (Studi Kasus Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, 16(2), 297-308.

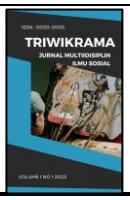
Saputra, E. A. W. H., Mutiawati, A. I., & Langadhy, L. (2022). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Usaha Mikro dan Kecil. https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.479

Sathya, Y. S., Syamsiah, D., & Putri, F. A. W. (2024). Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 3(9), 2525-2532.

Supadmo, H. (2023). Peran bpjs ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (jkk). Borneo Law Review. https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3243

Suwarji, S., & Sari, I. P. (2022). Implementasi pelayanan kesehatan peserta badan penyelenggara jaminan sosisial (bpjs) di kaji dari undang – undang no.24 th.2014 di rsud dr. soewondo kendal. https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i2.6

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Zuhad, S. F. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaaan Pada Sektor Publik (Studi tentang Aspek Penahapan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya Malang). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(1).

*Corresponding author
E-mail addresses: muzaryzam@gmail.com